

DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA DALAM MENGATASI HAMBATAN PERDAGANGAN CRUDE PALM OIL KE INDIA

A.Tiara Putri Nurdira, Sintia Catur Sutantri, Dwi Fauziansyah Moenardi, Arief Rahman Hakim

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Wanita Internasional

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available online Juni 2026

Email:

anditiaraa2@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Upaya diplomasi perdagangan Indonesia dalam mengatasi hambatan perdagangan Crude Palm Oil (CPO) ke India. Indonesia sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia menghadapi tantangan serius berupa kebijakan proteksionisme yang diterapkan India sebagai negara importir CPO terbesar secara global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah, sumber daring yang relevan, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, serta data statistik perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan proteksionisme India dalam penerapan kenaikan tarif impor CPO berdampak signifikan terhadap penurunan volume ekspor dan daya saing CPO Indonesia di pasar internasional, sehingga mendorong Indonesia untuk menempuh strategi diplomasi perdagangan melalui jalur bilateral maupun multilateral dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekspor CPO nasional.

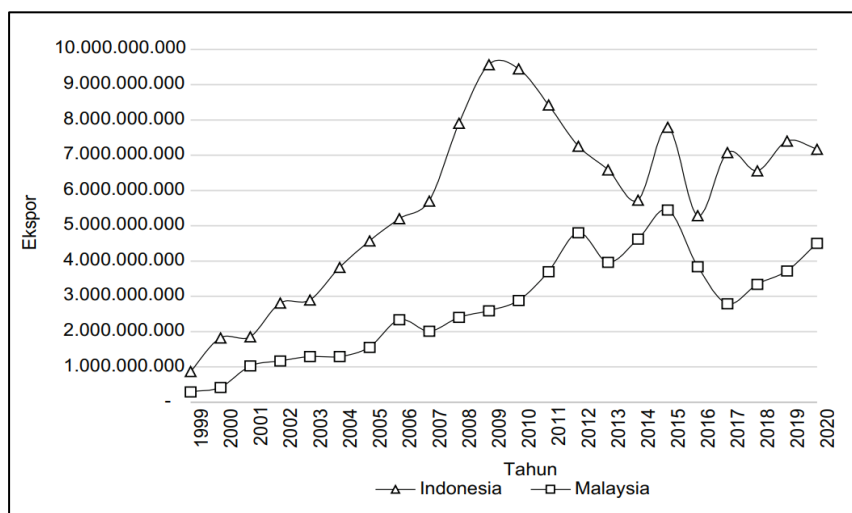
Kata Kunci : Crude Palm Oil (CPO), Diplomasi Perdagangan, Hambatan Perdagangan, Proteksionisme, India, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi fundamental terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sektor perdagangan berperan vital dalam mendorong perkembangan industri domestik serta peningkatan devisa negara melalui strategi promosi ekspor. Dalam peta komoditas global, Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah menduduki posisi strategis sebagai komoditas ekspor non-migas unggulan yang menopang agroindustri nasional serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Tyas (2022), fluktuasi kinerja ekspor CPO memiliki dampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga optimalisasi ekspor komoditas ini menjadi isu krusial dalam kebijakan ekonomi luar negeri.

Indonesia memegang posisi dominan sebagai produsen CPO terbesar dunia. Data *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten menempati posisi pertama dengan volume produksi rata-rata di atas 46 juta ton per tahun. Dominasi ini memberikan Indonesia keunggulan komparatif yang signifikan dalam menentukan dinamika pasar minyak nabati global. Hal ini diperkuat oleh data produksi tahun 2024 yang menunjukkan kapasitas produksi yang stabil, di mana Indonesia menjadi aktor utama dalam rantai pasok minyak sawit dunia.

Gambar 1.1 Volume ekspor CPO Indonesia dan Malaysia



Sumber : (Utsaha et al., 2022)

Data CPOPC (2024) mengonfirmasi dominasi absolut Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia selama periode 2020-2024, di mana volume produksi sempat mencapai 47.034 ribu ton pada 2020 dan relatif stabil di kisaran 46-48 juta ton hingga 2023, sebelum terkoreksi menjadi 44.000 ribu ton pada 2024. Secara komparatif, kapasitas produksi Indonesia jauh melampaui Malaysia yang hanya berada di kisaran 18.116 hingga 19.338 ribu ton selama periode yang sama sehingga menegaskan bahwa output Malaysia hanya mencakup sekitar setengah dari total produksi Indonesia. Kesenjangan volume yang signifikan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari supremasi Indonesia dalam rantai pasok minyak sawit global yang tetap bertahan di tengah fluktuasi tahunan.

Kesenjangan produksi yang masif ini menjadi fondasi empiris bagi keunggulan komparatif (comparative advantage) Indonesia yang sangat signifikan dalam industri sawit dunia, baik ditinjau dari aspek luas lahan perkebunan, produktivitas, maupun kapasitas ekspornya. Secara teoretis, keunggulan struktural ini menempatkan Indonesia sebagai aktor determinan atau main actor yang memiliki daya tawar dan kapabilitas untuk menentukan arah serta dinamika perdagangan CPO internasional. Dengan demikian, penguasaan atas keunggulan komparatif tersebut bukan hanya mengukuhkan Indonesia sebagai produsen terbesar, tetapi juga memberikan legitimasi struktural bagi Indonesia dalam mengelola kebijakan perdagangan komoditas strategis ini di pasar global.

Gambar 1.2 Negara Eksportir CPO Global

Year	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	47,034	46,888	46,729	48,530	44,000
Malaysia	19,141	18,116	18,453	18,552	19,338
Thailand	2,690	2,940	3,240	3,323	3,480
Colombia	1,558	1,748	1,769	1,842	1,720
Nigeria	1,280	1,350	1,420	1,460	1,540
Papua New Guinea	680	765	810	770	695
Honduras	700	650	645	655	500
Ghana	560	565	575	300	300
World	75,478	76,615	79,411	81,707	79,252

Sumber : (CPOPC, 2024)

Berdasarkan data dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, berdasarkan data pada Gambar 1.3 data pada tahun 2018-2024, India secara konsisten posisi sebagai salah satu pasar terbesar bagi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, dengan volume ekspor mencapai 6.415,8 ribu ton pada tahun 2018, kemudian mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 4.287,4 ribu ton pada tahun 2024. Meskipun terjadi beberapa periode, India tetap menjadi tujuan ekspor utama yang menunjukkan tinggi pada negara tersebut pasokan minyak kelapa sawit Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri pangan, kosmetik, dan energi domestiknya. Jika dibandingkan dengan negara tujuan lainnya seperti Tiongkok dan Pakistan, volume impor India secara umum masih berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga menjadikan negara ini sebagai mitra dagang strategis Indonesia dalam perdagangan CPO di pasar internasional.

Gambar 1.3 Negara Importir CPO dari Indonesia

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012 - 2024							
Negara tujuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berat bersih : 000 Ton							
India	6.415,8	4.655,3	4.631,9	3.101,8	4.999,3	5.406,9	4.287,4
Tiongkok	4.216,4	5.983,1	4.483,5	4.860,0	4.278,7	5.440,9	3.593,8
Pakistan	2.459,6	2.217,0	2.490,9	2.679,6	2.811,2	2.513,6	3.006,0
Belanda	1.262,3	1.103,7	765,5	580,1	551,5	392,8	450,4
Amerika Serikat	1.120,9	1.195,4	1.130,3	1.650,8	1.809,8	1.984,6	1.605,3
Spanyol	1.170,9	1.086,1	1.143,6	994,8	636,7	655,1	396,4
Mesir	938,1	1.096,4	975,3	1.041,9	682,4	967,8	842,0
Bangladesh	1.409,7	1.359,7	1.034,9	1.327,4	1.330,1	1.368,8	1.030,1
Italia	899,8	753,4	944,7	622,9	595,8	401,4	478,0
Singapura	435,8	594,6	367,4	56,3	109,6	22,4	0,6
Lainnya	9.464,4	10.335,5	9.875,7	10.655,1	9.372,1	9.474,1	8.564,8
Jumlah	29.793,8	30.380,4	27.843,7	27.570,8	27.177,2	28.628,4	24.254,8

Sumber : (BPS, 2024)

India dipilih sebagai fokus penelitian utama karena posisinya sebagai importir CPO terbesar yang setiap kebijakan perdagangannya baik berupa tarif impor maupun hambatan non-tarif memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja ekspor nasional. Mengingat struktur pasar CPO internasional cenderung bersifat monopolistik, ketergantungan ini menempatkan India sebagai mitra dagang strategis yang posisinya sangat menentukan dalam konteks diplomasi perdagangan Indonesia. Dominasi Indonesia sendiri didukung oleh kapasitas produksi yang masif; data CPOPC (2024) menunjukkan produksi Indonesia mencapai 44.000 ribu ton pada 2024, jauh melampaui Malaysia yang berada di angka 19.338 ribu ton. Namun, keunggulan komparatif dari sisi luas lahan dan produktivitas ini tidak otomatis menjamin stabilitas akses pasar saat berhadapan dengan kebijakan proteksionis negara mitra.

Ketergantungan pasar ini tercermin dalam data BPS yang menunjukkan volume ekspor ke India yang sempat mencapai 6.415,8 ribu ton pada 2018, namun mengalami kontraksi menjadi 4.287,4 ribu ton pada 2024. Penurunan volume tersebut mengindikasikan adanya disrupsi pada rantai pasok akibat kebijakan tarif yang dinamis. Meskipun India memiliki kebutuhan industri pangan dan non-pangan yang tinggi, tren penurunan ekspor menunjukkan bahwa kebijakan tarif India mampu mengubah perilaku pasar dan menekan posisi tawar Indonesia. Dengan demikian, peningkatan akses pasar di India bukan lagi sekadar persoalan teknis ekspor, melainkan tantangan diplomatik yang kompleks untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional di tengah persaingan perdagangan global.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini disusun sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi literatur terkait guna membangun fondasi

teoretis yang kokoh serta memberikan kontribusi baru dalam kajian hubungan internasional. Berdasarkan matriks penelitian terdahulu, telah dilakukan penelaahan terhadap lima studi relevan yang mencakup berbagai dimensi diplomasi perdagangan CPO, mulai dari strategi menjaga pasar di India melalui optimalisasi peran Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), analisis diplomasi minyak ke Italia yang berbasis pada interdependensi ekonomi, hingga strategi menghadapi hambatan non-tarif berupa kebijakan lingkungan (Renewable Energy Directive) oleh Uni Eropa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada strategi promosi, kebijakan lingkungan, atau diplomasi publik, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui fokus analisis yang tajam pada upaya diplomasi perdagangan dalam merespons proteksionisme tarif masuk yang diberlakukan secara sepihak oleh India pada tahun 2024. Perbedaan ini menjadi krusial karena kebijakan proteksionisme tarif menuntut instrumen negosiasi yang berbeda dibandingkan dengan isu citra produk atau hambatan non-tarif yang selama ini mendominasi literatur.

Fondasi teoretis penelitian ini dibangun melalui integrasi tiga tingkatan teori yang saling menguatkan dalam membedah fenomena perdagangan global. Sebagai grand theory, perspektif Liberalisme Ekonomi Adam Smith digunakan untuk memahami prinsip dasar pasar bebas yang menekankan efisiensi dan keuntungan bersama (mutual benefit), di mana intervensi negara melalui hambatan tarif dipandang sebagai penyimpangan terhadap mekanisme pasar alami. Untuk menganalisis dampak praktis dari distorsi tersebut, penelitian ini mengadopsi Teori Perdagangan Internasional dari Paul Krugman, yang menjelaskan bahwa penerapan tarif impor secara inheren akan meningkatkan biaya perdagangan (trade costs) serta menurunkan daya saing produk di pasar internasional. Sebagai instrumen aplikatif untuk menjawab persoalan tersebut, digunakan Teori Diplomasi Perdagangan dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock yang memosisikan proses negosiasi, baik melalui jalur bilateral maupun forum multilateral, sebagai sarana strategis bagi negara untuk mempertahankan kepentingan ekonomi nasional di tengah tekanan kebijakan mitra dagang.

Secara konseptual, alur pemikiran dalam penelitian ini bermula dari adanya hubungan interdependensi ekonomi antara Indonesia sebagai produsen terbesar dengan India sebagai pasar dominan, yang idealnya berjalan secara optimal. Namun, dinamika ini terganggu oleh kebijakan proteksionisme tarif India yang memicu instabilitas pasar ekspor bagi Indonesia. Kerangka ini mengarahkan analisis untuk mengevaluasi bagaimana Indonesia memanfaatkan instrumen diplomasi perdagangan baik melalui negosiasi bilateral, mekanisme *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA), maupun forum kolektif seperti *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) untuk mereduksi dampak kebijakan tersebut. Dengan memadukan ketiga pilar teoretis ini, penelitian secara sistematis mampu memetakan bagaimana posisi tawar Indonesia diperjuangkan melalui diplomasi ekonomi untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas strategis di tengah persaingan perdagangan global yang semakin proteksionis.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengeksplorasi secara mendalam makna dan dinamika diplomasi perdagangan Indonesia dalam mengatasi hambatan ekspor CPO ke India. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dinamika kebijakan tarif impor serta strategi respons pemerintah Indonesia. Sumber data utama bersifat sekunder, mencakup jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, serta statistik perdagangan dari UN Comtrade dan Trade Map yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang dilakukan secara komprehensif, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang didukung oleh pedoman klasifikasi data untuk mengelompokkan informasi ke

dalam tema-tema krusial, mulai dari hambatan tarif, dampak terhadap daya saing, hingga efektivitas strategi diplomasi.

Analisis data dilakukan melalui proses sistematis dan berkelanjutan dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang kemudian diinterpretasikan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas strategi diplomasi di lapangan. Dalam rangka memberikan penjelasan yang bersifat analitis dan teoretis, temuan empiris diuji menggunakan lensa Grand Theory Liberalisme Ekonomi dari Adam Smith, Middle Theory Perdagangan Internasional dari Paul Krugman, serta Applied Theory Diplomasi Perdagangan dari Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Penggunaan ketiga jenjang teori ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan penjelasan mengapa kebijakan proteksionisme India memicu penurunan daya saing ekspor dan bagaimana instrumen diplomasi berperan sebagai jembatan strategis untuk mempertahankan akses pasar di tengah tekanan kebijakan perdagangan global

IV. TEMUAN DAN DISKUSI

Hambatan perdagangan akibat kebijakan tarif impor CPO India

Kebijakan perdagangan India terhadap CPO merupakan anomali dari prinsip liberalisme ekonomi Adam Smith yang mendambakan efisiensi pasar global. Sebaliknya, praktik proteksionisme yang diterapkan India justru memvalidasi pandangan Paul Krugman mengenai tarif sebagai instrumen perlindungan sektor strategis yang secara inheren meningkatkan trade costs dan mendistorsi efisiensi perdagangan internasional. Fenomena kebijakan India sejak 2015 menunjukkan adanya pola proteksionisme siklikal, di mana tarif impor tidak digunakan sebagai instrumen fiskal semata, melainkan sebagai alat intervensi negara yang responsif terhadap dinamika pasokan dan permintaan minyak nabati domestik, serta sering kali digunakan untuk merespons tekanan politik dari kelompok petani minyak nabati lokal.

Secara historis, India telah melakukan penyesuaian tarif lebih dari 25 kali sejak 2015, yang menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah reaksi spontan, melainkan strategi terencana yang terus disesuaikan. Puncak dari dinamika ini terwujud pada 14 September 2024, di mana pemerintah India menaikkan bea masuk dasar CPO secara drastis dari 5,5% menjadi 27,5%, sementara produk olahan (RBD) dikenakan pajak hingga 35,75%. Langkah ini merupakan bagian integral dari agenda pembangunan pertanian nasional India, yakni National Vegetable Oil-Palm Mission (NMEO-OP) 2024-2031, yang menargetkan perluasan perkebunan dan peningkatan produksi domestik. Melalui misi ini, pemerintah India tidak hanya memberikan subsidi dan bantuan sarana bagi petani lokal, tetapi juga memfungsikan tarif impor sebagai instrumen fiskal untuk menciptakan ruang harga bagi produk domestik agar mampu bersaing tanpa tekanan dari CPO impor.

Struktur tarif yang diterapkan India juga dirancang secara deliberatif untuk mendorong aktivitas pengolahan di dalam negeri, dengan menetapkan tarif yang lebih rendah bagi minyak mentah dibanding minyak olahan. Strategi ini bertujuan mempertahankan nilai tambah bagi industri domestik India sekaligus menciptakan hambatan masuk bagi eksportir internasional. Akibatnya, kebijakan ini menciptakan hambatan perdagangan yang nyata, di mana efisiensi perdagangan menurun dan daya saing ekspor Indonesia menjadi tertekan akibat biaya perdagangan (trade costs) yang meningkat secara artifisial. Hal ini mempertegas bahwa kebijakan India bukan sekadar respons terhadap volatilitas pasar, melainkan bentuk proteksionisme struktural yang menjadikan tarif sebagai alat untuk memperkuat daya saing industri nasional dengan mengorbankan akses pasar bagi negara pengekspor..

Dampak kebijakan tarif India terhadap daya saing dan keberlangsungan ekspor CPO Indonesia

Kebijakan kenaikan tarif bea masuk CPO oleh India dari 5,5% menjadi 27,5% pada September 2024 telah menciptakan disrupsi struktural yang menekan daya saing ekspor Indonesia. Dalam perspektif teori perdagangan internasional Paul Krugman, peningkatan tarif ini secara langsung menaikkan trade costs, yang menyebabkan harga CPO Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan minyak nabati alternatif atau pasokan dari negara pesaing. Hal ini mengonfirmasi argumen dalam latar belakang bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional, alih-alih menciptakan efisiensi, justru membatasi akses pasar dan merusak mekanisme harga yang seharusnya berjalan alami.

Persaingan dengan Malaysia menjadi dimensi yang memperburuk posisi Indonesia, terutama karena Malaysia memiliki kapasitas industri rafinasi yang lebih efisien dan struktur pungutan ekspor yang lebih responsif terhadap perubahan kebijakan. Meskipun pemerintah Indonesia telah merespons melalui PMK Nomor 62 Tahun 2024 yang bertujuan menyamakan pungutan ekspor dengan Malaysia, efektivitas langkah ini tergerus oleh tingginya biaya logistik domestik Indonesia yang masih menjadi hambatan struktural bagi eksportir. Ketimpangan ini membuat produk Indonesia kalah kompetitif di pasar India, yang secara deliberatif menerapkan tarif diferensial untuk melindungi industri penyulingan domestik mereka sendiri.

Dampak empiris dari kebijakan ini terlihat jelas pada kinerja ekspor nasional. Adanya pembatalan pesanan secara sepihak oleh industri penyulingan minyak di India sebanyak 100.000 metrik ton tak lama setelah kenaikan tarif diberlakukan, merupakan indikator fundamental bahwa proteksionisme telah mengubah perilaku pembelian importir secara mendasar. Pembatalan dalam skala tersebut menunjukkan bahwa hambatan tarif India tidak hanya sekadar isu administratif, melainkan telah merusak komitmen perdagangan yang sebelumnya dibangun melalui hubungan jangka panjang.

Secara makro, kebijakan tarif India mengancam keberlangsungan ekspor CPO Indonesia dengan proyeksi penurunan volume ekspor sebesar 10-15%. Penurunan ini berimplikasi pada kerugian devisa yang signifikan, dengan estimasi nilai mencapai US\$1,2 hingga US\$1,5 miliar. Besarnya dampak ini menegaskan urgensi tantangan yang disebutkan dalam latar belakang, di mana ketergantungan pada pasar India yang menyerap 86,71% ekspor CPO (pada 2023) membuat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan kebijakan unilateral.

Dengan demikian, kondisi ini membuktikan bahwa daya saing Indonesia kini terhambat oleh variabel yang berada di luar kontrol eksportir nasional. Hal ini selaras dengan tinjauan pustaka yang menyebutkan bahwa tanpa penyelesaian hambatan tarif secara diplomatik, strategi domestik saja seperti deregulasi fiskal tidak akan cukup untuk memulihkan posisi ekspor Indonesia. Stabilitas volume ekspor yang terganggu saat ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan proteksionis India yang berhasil menekan posisi tawar Indonesia sebagai eksportir utama dunia.

Diplomasi Perdagangan Indonesia dalam Mengatasi Hambatan Tarif Impor CPO India

Dalam menghadapi kebijakan proteksionisme India yang menaikkan tarif CPO menjadi 27,5% pada 2024, Indonesia tidak mengandalkan satu saluran diplomasi saja. Mengacu pada perspektif diplomasi perdagangan Bayne dan Woolcock, Indonesia memadukan pendekatan bilateral dan multilateral untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan memanfaatkan proses negosiasi serta kerja sama ekonomi yang terinstitusionalisasi.

Langkah bilateral pertama yang diambil pemerintah adalah penyesuaian fiskal domestik melalui PMK Nomor 62 Tahun 2024. Kebijakan ini merombak pungutan ekspor CPO dari specific levy menjadi persentase 7,5% dari harga referensi guna menyamakan beban biaya dengan

Malaysia agar produk Indonesia tetap kompetitif. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan mandatori biodiesel sebagai instrumen penyeimbang untuk menyerap kelebihan pasokan CPO domestik, sehingga harga tandan buah segar di tingkat petani tidak anjlok akibat berkurangnya volume ekspor ke India.

Lebih jauh, diplomasi bilateral diperkuat dengan melibatkan aktor non-negara melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara GAPKI dan *Indian Vegetable Oil Producers' Association* (IVPA) pada Juli 2025 di New Delhi. MoU yang berlaku selama tiga tahun ini mencakup lima bidang kerja sama: pertukaran teknis, riset dan pengembangan, inisiatif keberlanjutan, koordinasi kebijakan, serta keamanan pangan. Keterlibatan asosiasi industri swasta ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok dan membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan di tengah kebijakan tarif sepihak yang sering berubah-ubah.

Di jalur multilateral, Indonesia memanfaatkan kerangka *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) sebagai sarana konsultasi dan koordinasi untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan tarif India yang tidak selaras dengan komitmen liberalisasi perdagangan kawasan. Indonesia juga mengoptimalkan *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) sebagai forum tekanan normatif kolektif. Melalui CPOPC, Indonesia bersama negara produsen lainnya memperjuangkan posisi tawar yang lebih kuat terkait isu hambatan perdagangan, akses pasar, dan promosi keberlanjutan sawit di level internasional.

Integrasi diplomasi juga dilakukan melalui berbagai forum dialog formal yang terinstitusionalisasi, seperti Biennial Trade Ministers' Forum (BTMF), India-Indonesia Working Group on Trade and Investment (WGTI), serta Economic and Financial Dialogue (EFD). Forum-forum ini menjadi wadah bagi delegasi Indonesia untuk melakukan negosiasi teknis dan penyelesaian hambatan perdagangan secara terukur. Meski demikian, efektivitas seluruh jalur diplomasi ini tetap bergantung pada komitmen India untuk menjalankan kesepakatan regional dan bilateral, mengingat kebijakan tarif India sering kali dipicu oleh agenda politik domestik yang bersifat jangka pendek.

Peran Bilateral dan Multilateral dalam Diplomasi Perdagangan CPO

Dalam upaya mengatasi hambatan perdagangan yang muncul akibat kebijakan tarif India, Indonesia menerapkan strategi diplomasi yang mengintegrasikan jalur bilateral dan multilateral secara sinergis. Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memadukan negosiasi langsung antar negara dengan pemanfaatan kerangka kerja ekonomi regional yang terinstitusionalisasi. Sinergi antara kedua jalur ini menjadi krusial karena Indonesia tidak hanya membutuhkan penyelesaian isu teknis perdagangan secara cepat, tetapi juga memerlukan jaminan keberlanjutan akses pasar yang didukung oleh norma-norma perdagangan internasional yang disepakati bersama.

Pada jalur bilateral, negosiasi difokuskan pada penguatan kerja sama yang melibatkan aktor non-negara guna memperkuat stabilitas rantai pasok. Langkah konkret yang paling menonjol adalah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan *Indian Vegetable Oil Producers' Association* (IVPA) pada Juli 2025 di New Delhi. Perjanjian ini menjadi langkah strategis karena tidak hanya mengandalkan negosiasi antar pemerintah, tetapi juga membangun kemitraan antara asosiasi industri kedua negara untuk memastikan kelancaran perdagangan di tengah kebijakan tarif yang fluktuatif.

MoU tersebut mencakup lima bidang kerja sama utama yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan perdagangan CPO, yaitu pertukaran teknis, riset dan pengembangan, inisiatif keberlanjutan, koordinasi kebijakan, serta keamanan pangan. Kerja sama ini diakui sebagai bukti bahwa meskipun terjadi ketegangan akibat kebijakan tarif tinggi, kedua negara tetap

berkomitmen menjaga jalur komunikasi kooperatif melalui pelibatan swasta. Bagi Indonesia, kerja sama ini penting karena minyak sawit dan turunannya menyumbangkan nilai yang sangat besar dari total perdagangan bilateral, sehingga stabilitas hubungan dagang sawit menjadi penentu bagi ekonomi kedua negara.

Dengan melibatkan aktor industri swasta sebagai pelengkap negosiasi pemerintah, Indonesia berupaya menjaga agar hubungan dagang sawit tidak mudah terguncang oleh kebijakan tarif sepihak. Dalam pandangan teori diplomasi perdagangan, pelibatan aktor non-negara ini merupakan implementasi nyata diplomasi yang memperkuat kepercayaan antarpemangku kepentingan, meningkatkan transparansi perdagangan, serta menciptakan hubungan ekonomi yang lebih stabil dan saling menguntungkan di tengah dinamika kebijakan proteksionisme.

Di jalur multilateral, Indonesia memanfaatkan kerangka kerja *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan perdagangan dan menekan kebijakan tarif yang menghambat akses pasar CPO nasional. Forum ini menjadi platform strategis bagi Indonesia untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan India serta mendorong agar implementasi kebijakan perdagangan tetap selaras dengan komitmen liberalisasi tarif yang telah disepakati dalam perjanjian perdagangan kawasan. Melalui mekanisme konsultasi di forum ini, Indonesia berupaya menempatkan isu perdagangan sawit ke dalam koridor regulasi yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak.

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterbatasan mendasar dalam efektivitas forum multilateral tersebut. Fakta bahwa India tetap mampu menaikkan tarif impor CPO secara sepihak pada September 2024 meski AIFTA sudah berlaku memperlihatkan bahwa India secara cerdas telah memanfaatkan klausul pengecualian dan fleksibilitas dalam perjanjian untuk melindungi komoditas sensitif domestiknya dari kewajiban liberalisasi penuh. Kondisi ini mencerminkan realitas dalam hubungan internasional di mana perjanjian multilateral sekalipun tidak dapat sepenuhnya mengikat negara besar yang memiliki kekuatan tawar lebih tinggi saat mereka berupaya melindungi kepentingan domestik mereka.

Meskipun demikian, peran forum multilateral tetap dianggap vital sebagai sarana bagi Indonesia untuk melakukan tekanan normatif dan menyampaikan argumentasi ekonomi di panggung kawasan. Forum multilateral tidak hanya berfungsi sebagai media penyelesaian hambatan perdagangan, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun konsensus mengenai posisi strategis sawit sebagai komoditas yang mendukung keamanan pangan global. Dengan demikian, pemanfaatan AIFTA menunjukkan bahwa diplomasi perdagangan dilakukan melalui dialog yang terinstitusionalisasi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen negara anggota untuk mematuhi prinsip liberalisasi perdagangan yang telah disepakati bersama dalam forum tersebut.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan proteksionisme India melalui kenaikan tarif bea masuk CPO menjadi 27,5% pada September 2024 merupakan tantangan struktural yang mengancam daya saing dan stabilitas ekspor Indonesia. Fenomena ini membuktikan bahwa keunggulan komparatif saja tidak cukup menghadapi kebijakan unilateral negara mitra yang dipicu oleh ambisi domestik dan tekanan politik. Respons Indonesia terbukti adaptif, memadukan kebijakan domestik dengan diplomasi luar negeri untuk memitigasi dampak negatif terhadap volume ekspor dan devisa negara.

Dalam perdagangan bilateral, Indonesia bersikap kooperatif namun tegas. Strategi yang ditempuh meliputi penyesuaian fiskal melalui PMK Nomor 62 Tahun 2024 untuk menjaga daya saing harga, optimalisasi kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan mandatori biodiesel, serta memperkuat diplomasi soft power melalui penandatanganan MoU antara GAPKI dan *Indian*

Vegetable Oil Producers' Association (IVPA) pada Juli 2025. Pelibatan asosiasi industri ini menegaskan upaya Indonesia dalam membangun kemitraan strategis untuk menstabilkan rantai pasok di tengah kebijakan tarif yang fluktuatif.

Pada jalur multilateral, Indonesia aktif memanfaatkan forum *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) dan *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) untuk menekan proteksionisme dan menuntut kepatuhan India terhadap komitmen liberalisasi. Melalui dialog terinstitusionalisasi seperti *Biennial Trade Ministers' Forum* (BTMF), *Working Group on Trade and Investment* (WGTI), serta *Economic and Financial Dialogue* (EFD), Indonesia secara konsisten mengedepankan pendekatan dialogis sebagai mekanisme penyelesaian hambatan perdagangan yang formal dan terukur.

Secara keseluruhan, diplomasi perdagangan Indonesia bersifat multidimensi dan berkelanjutan. Keberhasilan diplomasi ini tidak hanya diukur dari pencabutan tarif, melainkan dari kemampuan Indonesia mempertahankan akses pasar, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan isu keberlanjutan dan perlindungan sosial (termasuk isu gender) sebagai instrumen daya saing produk. Strategi diplomasi yang mengombinasikan negosiasi bilateral taktis dan penguatan posisi tawar multilateral adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekspor CPO nasional di tengah persaingan pasar global yang semakin proteksionis.

VI. BATASAN & PENELITIAN LEBIH LANJUT

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka yang sepenuhnya mengandalkan data sekunder, sehingga kedalaman analisis empiris terbatas pada dokumen dan literatur yang tersedia secara publik tanpa melibatkan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan seperti pejabat Pemerintahan, maupun representasi asosiasi industri seperti GAPKI, yang berpotensi memberikan perspektif lapangan yang lebih kaya dan kontekstual. Selain itu, cakupan penelitian hanya berfokus pada dinamika hubungan bilateral Indonesia-India dalam komoditas CPO tanpa melibatkan analisis komparatif dengan strategi diplomasi perdagangan Malaysia sebagai sesama negara produsen CPO terbesar, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat diukur keunggulan dan kelemahannya secara relatif.

Untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut, penelitian lebih lanjut disarankan menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan data primer melalui wawancara mendalam guna memperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai proses negosiasi diplomatik yang berlangsung di balik kebijakan formal, serta memperluas kerangka analisis dengan menggunakan teori negosiasi internasional atau teori rezim internasional untuk mengkaji secara lebih mendalam dinamika kekuatan struktural antara Indonesia dan India, termasuk mengeksplorasi potensi percepatan CEPA Indonesia-India dan efektivitas diversifikasi pasar ekspor CPO ke negara-negara potensial seperti Bangladesh, Pakistan, dan kawasan Afrika sebagai respons strategis jangka panjang terhadap volatilitas kebijakan proteksionisme negara mitra dagang utama.

REFERENSI

- Ahdiat, A. (2023). *Permintaan Global Melemah, Harga CPO Turun pada Oktober 2023. Databooks.*
<https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/9ca0001fe928d18/permintaan-global-melemah-harga-cpo-turun-pada-oktober-2023>

- Amale, M. (2025). India-Indonesia Palm Oil Diplomacy, 2025: An Evolution Forthcoming Amid Emerging Sustainability Concerns. *IMPRI*. <https://www.impriindia.com/insights/india-indonesia-palm-oil-diplomacy-and-sustainability-2025/>
- Analisd.com. (2023). *Harga CPO Tertekan Uni Eropa dan India*. Analisd.Com. <https://analisd.com/detail/691/harga-cpo-tertekan-uni-eropa-dan-india>
- Ananda, T., & Shiddiqy, M. A. A. (2025). *STRATEGI OPTIMALISASI EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) DI PELABUHAN DUMAI*. 11(2), 106-114.
- Asmarita, D. H. (2024). *DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA DALAM MENYIKAPI HAMBATAN NON TARIF UNI EROPA TERADAP EKSPOR CPO INDONESIA TAHUN 2017-2020*. 01(01).
- Astra Agro. (2024). Menilik Dampak Penerapan PMK 62/2024 Terhadap Kinerja Ekspor CPO Indonesia. *Astra Agro*. <https://www.astra-agro.co.id/id/2024/09/24/menilik-dampak-penerapan-pmk-62-2024-terhadap-kinerja-ekspor-cpo-indonesia/>
- BPS. (2024). *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2024*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama-2012--2020.html>
- Cantika, S., Nuzulian, U., Iriansyah, A., Nugrahaningsih, N., & Suratiningsih, D. (2023). *Perkembangan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Tiongkok dalam Kerjasama Meningkatkan Ekspor Crude Palm Oil Tahun 2020-2023*. 17(2), 473-498.
- Carthy, J. J. T. M., & Sukadana, I. W. (2025). *ANALISIS STRUKTUR PASAR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA*. 13, 841-863. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/113502>
- CPOPC. (2024). *CPO Production (Thousand Tonnes)*. CPOPC Palm Oil Database. <https://cpopc.net/database/dataset/chart/67/cpo-production/line/chart-tab82821301/2020-2024>
- Dewani, N. S., & Srifauzi, A. (2023). *Analisis diplomasi minyak indonesia ke italia*. 5(1).
- DPR. (2024). *Dampak kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor*.
- GAPKI. (2017). Kebijakan Minyak Nabati “Make In India” dan Tarif Impor. *GAPKI*. <https://gapki.id/news/2017/10/10/kebijakan-minyak-nabati-make-india-dan-tarif-impor/>
- GAPKI. (2025). Outlook Industri Sawit Indonesia 2026: Prospek, Tantangan, dan Strategi Menghadapi Era Baru Pasar Global. *GAPKI*. <https://gapki.id/news/2025/11/17/outlook-industri-sawit-indonesia-2026-prospek-tantangan-dan-strategi-menghadapi-era-baru-pasar-global/>
- Hakim, L. (2024). *Pengertian Tinjauan Pustaka: Contoh, Fungsi dan Cara Membuat*. Deepublish Store. <https://deepublishstore.com/blog/tinjauan-pustaka/>
- Hortus. (2025). Dampak Kenaikan Bea Masuk India Terhadap Ekspor CPO Indonesia. *Majalah Hortus*. <https://news.majalahhortus.com/dampak-kenaikan-bea-masuk-india-terhadap-ekspor-cpo-indonesia/>
- IKPI. (2025). Kenaikan Pajak Impor CPO India Berpotensi Menekan Ekspor Sawit Indonesia. *IKPI*. <https://ikpi.or.id/en/kenaikan-pajak-impor-cpo-india-berpotensi-menekan-ekspor-sawit-indonesia/>
- Jain, S. (2024). India’s Farmers Are Mobilizing Against the Modi Government. *Jacobin*. <https://jacobin.com/2024/04/india-farmer-protest-modi-2024-elections>
- Kemendag. (2023). *Harga Referensi CPO Anjlok di Akhir 2023, Ini Biang Keroknya*. Kemendag.Go.Id. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/harga-referensi-cpo-anjlok-di-akhir-2023-ini-biang-keroknya>
- Kemenkeu. (2024, November 21). Pemerintah Dukung Peningkatan Ekspor dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekspor-dan-Hilirisasi-Industri-Kelapa-Sawit>

- Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2018). Daya Saing Minyak Sawit Dan Dampak Renewable Energy Directive (Red) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5(2), 125. <https://doi.org/10.29244/jai.2017.5.2.125-136>
- Killian, P. M. E. (2020). *Global : Jurnal Politik Internasional Indonesia ' s Trade Diplomacy Through FTA: Analysis on Actors , Processes , and Goals of Diplomacy*. 22(2). <https://doi.org/10.7454/global.v22i2.492>
- Kinski, N., Tanjung, A. A., & Sukardi. (2023). *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2018 - 2022*. 6, 568-578.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2012). *Internasional Economics Theory & Policy* (9th ed.).
- Larasati, N. (n.d.). *Review Economic Diplomacy oleh Nicholas Bayne dan*.
- Lutfiah Abdullah, S., Fadliyah Akbariyah, A., & Wikansari, R. (2024). Potensi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, 4307(1), 61-67. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Map, T. (n.d.). *Trade Map*. https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7C699%7C%7C%7C1511%7C%7C%7C4%7C1%7C1%7C1%7C2%7C1%7C2%7C1%7C1%7C1
- Mukherjee, S. (2024). *BJP's road ahead to fulfill agri promises in 2024 election manifesto*. Business Standard. https://www.business-standard.com/industry/news/bjp-s-road-ahead-to-fulfill-agri-promises-in-2024-election-manifesto-124042301070_1.html
- Muzahid, A., & Samputra, P. L. (2024). *Strategi perdagangan internasional sawit Indonesia menghadapi penerapan renewable energy directive (RED) oleh Uni Eropa (UE) dengan pendekatan intelijen kompetitif*. 1(2), 151-170.
- Nurhanisah, Y. (2025). *Indonesia Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia*. Indonesiabaik.Id. <https://www.indonesiabaik.id/infografis/indonesia-produsen-minyak-sawit-terbesar-di-dunia>
- Prasetyo, D., Oktaviani, R., Hukum, F., Padjadjaran, U., Hukum, F., Padjadjaran, U., Info, A., Policy, T., Regulation, T., Effectiveness, L., & Trade, G. (2025). *Tantangan Hukum Perdagangan Internasional Pasca Pandemi dalam Analisis Kebijakan Tarif dan non-Tarif*. 3(3), 1072-1087.
- Prayudhia, M. C. G. (2024, November 1). Kenaikan harga CPO November dipengaruhi permintaan India dan Tiongkok. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4435545/kenaikan-harga-cpo-november-dipengaruhi-permintaan-india-dan-tiongkok>
- Purnama, L., Haryono, S., & Hidayat, F. (2022). *ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL KOMODITAS CRUDE PALM OIL (CPO) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI*. 1(2), 59-71.
- PusatData, K. (2025). Volume Ekspor CPO dan Turunannya Tahun 2024. *Kontan.Co.Id*. <https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/42/Volume-Ekspor-CPO-dan-Turunannya-Tahun-2024>
- Qoni'ah, R. (2024). *Kemitraan Strategis Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat : Menavigasi Tantangan Global dan Potensi Keunggulan Kompetitif*. 11(2).
- Rahmawati, W. T. (2018, April 12). Tarif impor India bikin harga CPO ambruk. *Kontan*. <https://investasi.kontan.co.id/news/tarif-impor-india-bikin-harga-cpo-ambruk>
- Rhamadanty, S., & Hidayat, K. (2024). India Naikkan Pajak Impor CPO Menjadi 27,5% Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "India Naikkan Pajak Impor CPO Menjadi 27,5%." *Internasional Kontan*. <https://internasional.kontan.co.id/news/india-naikkan-pajak-impor-cpo-menjadi-275>
- Rom, M. C., Hidaka, M., & Walker, R. B. (2022). *Introduction to Political Science*. OpenStax.

- RSPO. (2022). Lahan Subur Prakarsa Kelapa Sawit Domestik India adalah Batu Loncatan untuk Produksi Berkelanjutan. *RSPO*. <https://rspo.org/id/fertile-ground--indias-domestic-palm-oil-initiative-is-a-springboard-for-sustainable-production/>
- Saputri, L., Hamidah, S. W., Husna, N. S., Islam, U., Kiai, N., Acmad, H., & Jember, S. (n.d.). *Peluang dan tantangan ekspor impor di era globalisasi*.
- SawitIndonesia. (2024). Pemerintah Memperkuat Peran CPOPC Dalam Mendukung Prioritas Nasional. *Sawit Indonesia*. <https://sawitindonesia.com/pemerintah-memperkuat-peran-cpopc-dalam-mendukung-prioritas-nasional/>
- Singh, A. (2022). *Centre allows duty-free imports of crude soyabean, sunflower oil*. *Deccanherald.Com*.
- Tyas, H. P. (2022). Analisis Ekspor Indonesia Tahun 1990-2019. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 37-52. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- UI, L. F. (2022). *Krisis Global yang diperpanjang oleh Tensi Geopolitik*. 1-23.
- UkrAgroConsult. (2024). *India, Indonesia sign strategic agreement on palm oil for growth and sustainable development*. *UkrAgroConsult*. <https://ukragroconsult.com/en/news/india-indonesia-sign-strategic-agreement-on-palm-oil-for-growth-and-sustainable-development/>
- Utama, B. (2023). *DAMPAK KERJASAMA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA) TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA KE*.
- Utsaha, A., Utami, A. D., & Suharno, S. (2022). Perbandingan Daya Saing Crude Palm Oil (CPO) Antara Indonesia dan Malaysia di Pasar Internasional. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 30(2), 95-108. <https://doi.org/10.22302/iopri.jur.jpks.v30i2.177>
- Widi, H. (2023, April 28). Pasar Masih Lesu, Hak Ekspor CPO Menumpuk. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/pasar-masih-lesu-hak-ekspor-cpo-menumpuk>
- Wijaya, R. S. (2020). Analisis struktur pasar dan daya saing ekspor crude palm oil (cpo) Indonesia di Pasar Internasional. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66255%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66255/1/RASID SUKMA WIJAYA-FST.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66255%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66255/1/RASID%20SUKMA%20WIJAYA-FST.pdf)
- WTO. (2023, April 5). Trade growth to slow to 1.7% in 2023 following 2.7% expansion in 2022. *WTO*. https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/tfore_05apr23_e.htm?utm_source=chatgpt.com
- Yahya, G. Y., & Gunawan, D. (2019). Strategy of Indonesia Government To Mantains Palm Oil Market in India. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 75. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.75-87.2019>
- Yarsi, U. (2025). *Strategi Menghadapi Tarif Impor Tinggi AS: Koalisi Global, ASEAN, atau Negosiasi Bilateral?* <https://www.yarsi.ac.id/strategi-menghadapi-tarif-impor-tinggi-as-koalisi-global-asean-atau-negosiasi-bilateral>